




2022

Laporan Kinerja

KPKNL Pematang Siantar

Sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Pematang Siantar selama periode Tahun 2022



PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pematang Siantar Tahun 2022. KPKNL Pematang Siantar telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen pengukuran kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pematang Siantar atas pencapaian tujuan/sasaran strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi.

Laporan Kinerja KPKNL Pematang Siantar Tahun 2022 merupakan bahan monitoring dan evaluasi kinerja tahun 2022 dan basis perencanaan kinerja tahun berikutnya. Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematang Siantar tahun 2022 sebesar 115,43% yang diperoleh dari capaian atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, mayoritas IKU telah mencapai target dan kami senantiasa berupaya meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih banyak pada segala pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pematang Siantar tahun 2022. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran capaian kinerja yang telah dicapai KPKNL Pematang Siantar pada tahun 2022 berupa keberhasilan, kegagalan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi .

Pematang Siantar, 27 Januari 2022

Kepala KPKNL Pematang Siantar



Agus Setiyo Pambudi

NIP. 19780805 200212 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Tugas, Fungsi, dan Struktur KPKNL Pematangsiantar.....	1
B.Peran Strategis KPKNL Pematangsiantar.....	7
1.Pengelolaan Kekayaan Negara	7
2.Penilaian.....	7
3.Pelayanan Lelang	7
4.Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN.....	8
C.Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja.....	8
D.Sistematika Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis	10
B. Penetapan Kinerja	11
Sasaran Strategis 1	11
Sasaran Strategis 2	12
Sasaran Strategis 3	12
Sasaran Strategis 4	12
Sasaran Strategis 5	13
Sasaran Strategis 6	13
Sasaran Strategis 7	13
Sasaran Strategis 8	13
Sasaran Strategis 9	13
Sasaran Strategis 10	14
Sasaran Strategis 11.....	14
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian	15
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.	17
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi.	18
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal.	19
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.....	22
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif..	23

7. Edukasi yang Efektif.....	24
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.....	25
9. SDM yang Kompeten.....	26
10. Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	27
11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A.Capaian Kinerja Organisasi.....	32
1. Evaluasi Kinerja Tahun 2022.....	34
1.1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian	34
1.2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	35
1.3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	36
1.4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	36
1.5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.....	37
1.6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	38
1.7. Edukasi yang Efektif	38
1.8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.....	38
1.9. SDM yang Kompeten.....	39
1.10. Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	39
1.11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal.....	41
2. Evaluasi Kinerja 2020-2022.....	42
2.1. IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang atau IKU manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara.....	42
2.2. IKU indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL.....	43
2.3. IKU persentase realisasi pokok lelang atau IKU persentase hasil lelang.....	44
2.4. IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan.....	45
2.5. IKU persentase produktivitas lelang	46
2.6. IKU persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	47
2.7. IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	48
2.8. IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai	49
2.9. IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran	50
B.Realisasi Anggaran.....	51

BAB IV PENUTUP.....	53
A.Simpulan Umum.....	53
B.Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Akuntabilitas Kinerja KPKNL Pematang Siantar dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang disampaikan kepada *Stakeholder* melalui Laporan Kinerja KPKNL Pematang Siantar tahun 2022. Laporan Kinerja KPKNL Pematang Siantar tahun 2022 menggambarkan capaian kinerja yang telah berhasil dicapai oleh KPKNL Pematang Siantar pada tahun 2022 sehingga laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN untuk tahun 2020-2024 yaitu:

“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparans dan akuntabel; dan
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk membantu memudahkan pencapaian visi dan misi dalam rencana Strategis KPKNL Pematang Siantar ke dalam rencana kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin KPKNL Pematang Siantar Tahun 2022 terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis Kemenkeu Three KPKNL tahun 2022 adalah sebesar 115,43% dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian				
1a-CP		Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp3,96M)	135,13% (Rp5,35M)	120%
		a. PNBPN Pengelolaan BMN	100% (Rp2,05M)	129,67% (Rp2,66M)	120%
		b. PNBPN Piutang Negara	100% (Rp5,63Jt)	179,90% (Rp10,12Jt)	120%
		c. PNBPN Lelang	100% (Rp1,90M)	140,88% (Rp2,68M)	120%
1b-CP		Persentase Produktivitas Lelang	36%	45,15%	120%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
2a-CP		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp62M)	166,31% (Rp103,11M)	120%
		a. Pokok Lelang Kelas I	100% (Rp20M)	191,83% (Rp38,37M)	120%
		b. Pokok Lelang Pegadaian	100% (Rp42M)	154,15% (Rp64,74M)	120%
2b-CP		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	270,84%	120%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi				
3a-CP		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,77	4,90	102,73%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal				
4a-CP		Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	90,66%	120%
4b-CP		Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	100%	115,91%	115,91%
4c-CP		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	128,57%	120%
4d-CP		Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	122%	120%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				
5a-CP		Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	0,50%	120%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
6a-N		Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%	100%	108,70%
6b-CP		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,00%	120%
		a. Deviasi Data PNBPN Lelang	10%	0,00%	120%

		b. Deviasi Data PNBPI Piutang Negara	10%	0,00%	120%
7	Edukasi yang efektif				
7a-N		Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90	98,85	109,83%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif				
8a-CP		Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%	92,50%	108,82%
9	SDM yang Kompeten				
9a-N		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	120%
10	Organisasi yang Fit For Purpose				
10a-N		Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85	95,44	112,28%
10b-N		Nilai Review Pengelolaan Kinerja	80	99	120%
10c-N		Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99,21	110,23%
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
11a-CP		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,73%	100,24%
11b-N		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	204%	120%

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Pematang Siantar menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan barang pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi kekayaan negara, penilaian, piutang negara;
8. Pelaksanaan penetapan/penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang/barang jaminan;
9. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
10. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang;
11. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dengan motto “*Mauliate*” (*Mandiri, Unggul, Integritas, Akuntabel, Tepat Waktu*), seluruh pejabat/pegawai KPKNL Pematang Siantar telah bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dalam *Kemenkeu Three* tahun 2022 dengan penuh pengabdian, tanggung jawab, dan penuh keikhlasan.

Akhir kata dengan semangat Birokrasi Reformasi dan untuk mewujudkan **Good Governance** dalam pelayanan kepada *stakeholder/customer* maka KPKNL Pematang Siantar akan tetap berpedoman pada serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur KPKNL Pematang Siantar

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan pasal 30 PMK nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL Pematang Siantar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL

Susunan Organisasi KPKNL terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi KPKNL Pematang Siantar



Sesuai dengan PMK nomor 154/PMK.01/2021, wilayah kerja KPKNL Pematang Siantar meliputi:

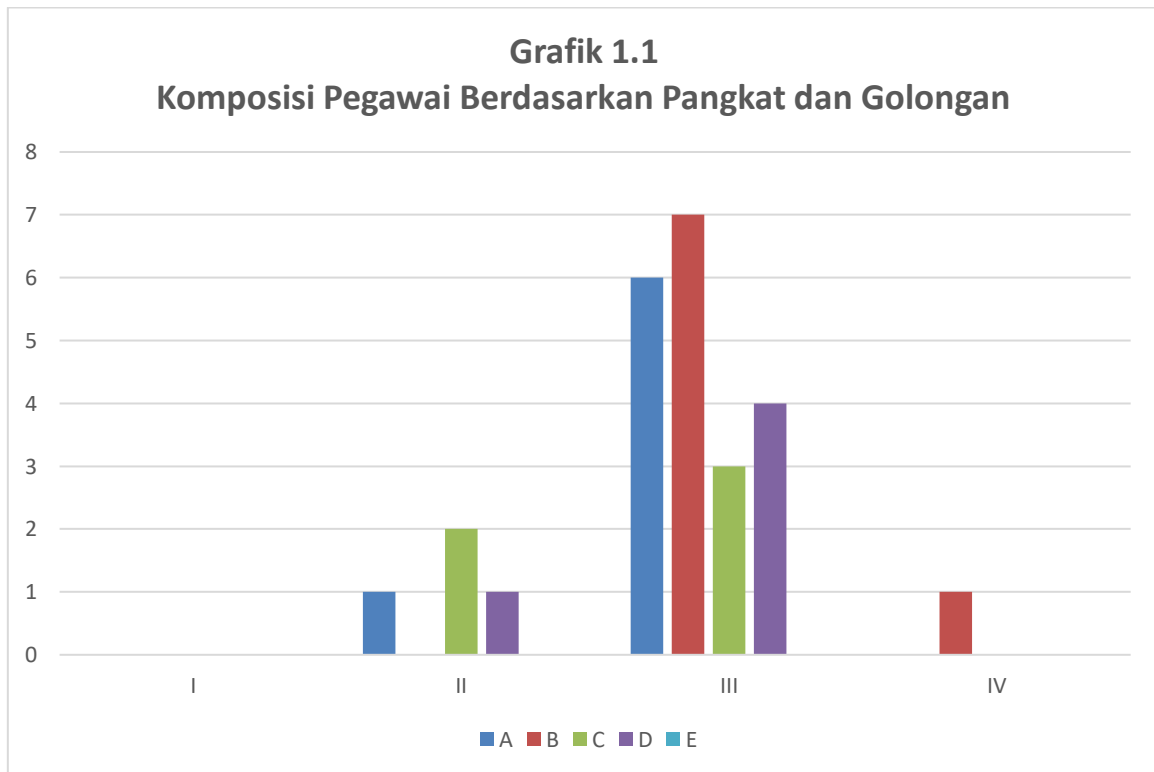
- a. Kota Pematang Siantar
- b. Kota Tebing Tinggi
- c. Kabupaten Samosir
- d. Kabupaten Simalungun
- e. Kabupaten Toba
- f. Kabupaten Dairi
- g. Kabupaten Pakpak Bharat

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh sumber daya manusia. Adapun jumlah pegawai pada periode 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

I. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

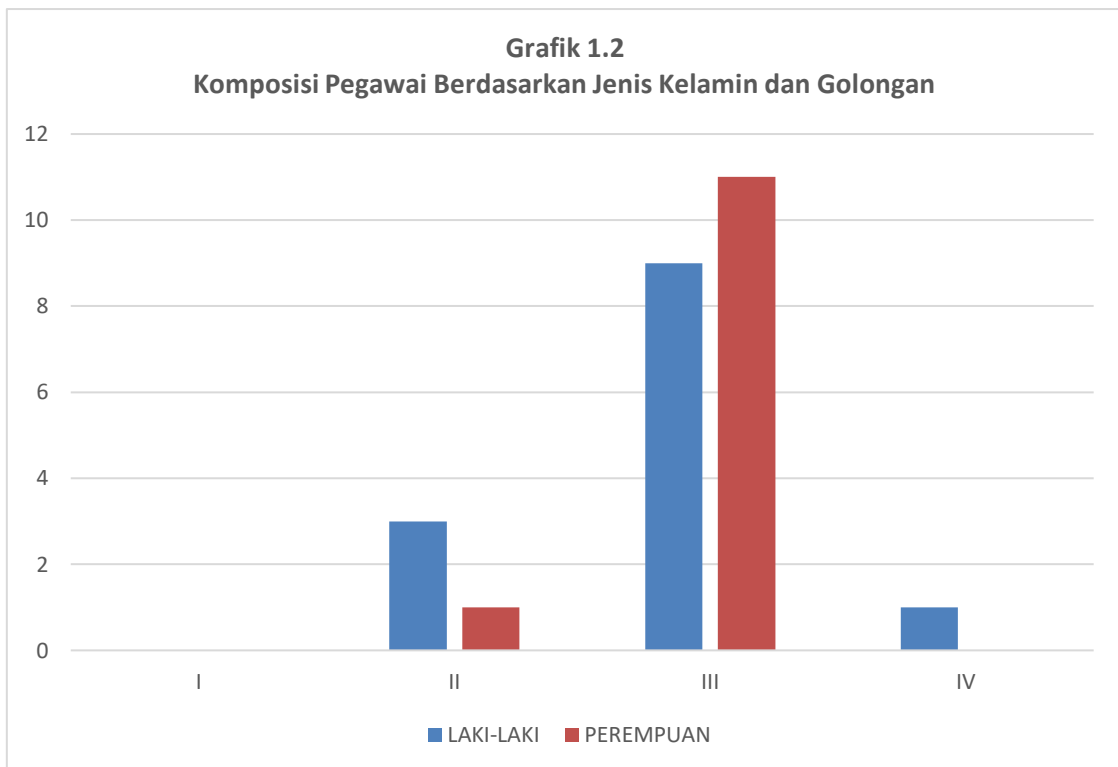
GOLONGAN	RUANG					JUMLAH
	A	B	C	D	E	
I	0	0	0	0	0	0
II	1	0	2	1	0	4
III	6	7	3	4	0	20
IV	0	1	0	0	0	1
JUMLAH	7	8	5	5	0	25



II. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

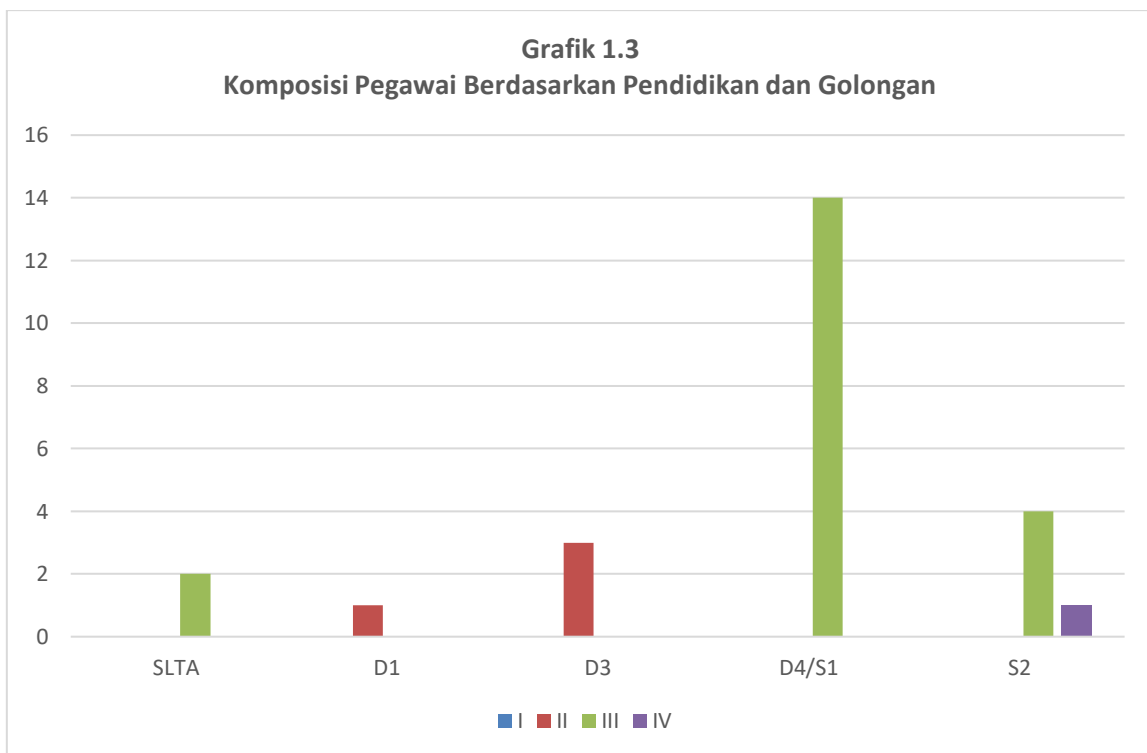
JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
LAKI-LAKI	0	3	9	1	13
PEREMPUAN	0	1	11	0	12
JUMLAH	0	4	20	1	25



III. Berdasarkan Pendidikan dan Golongan :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

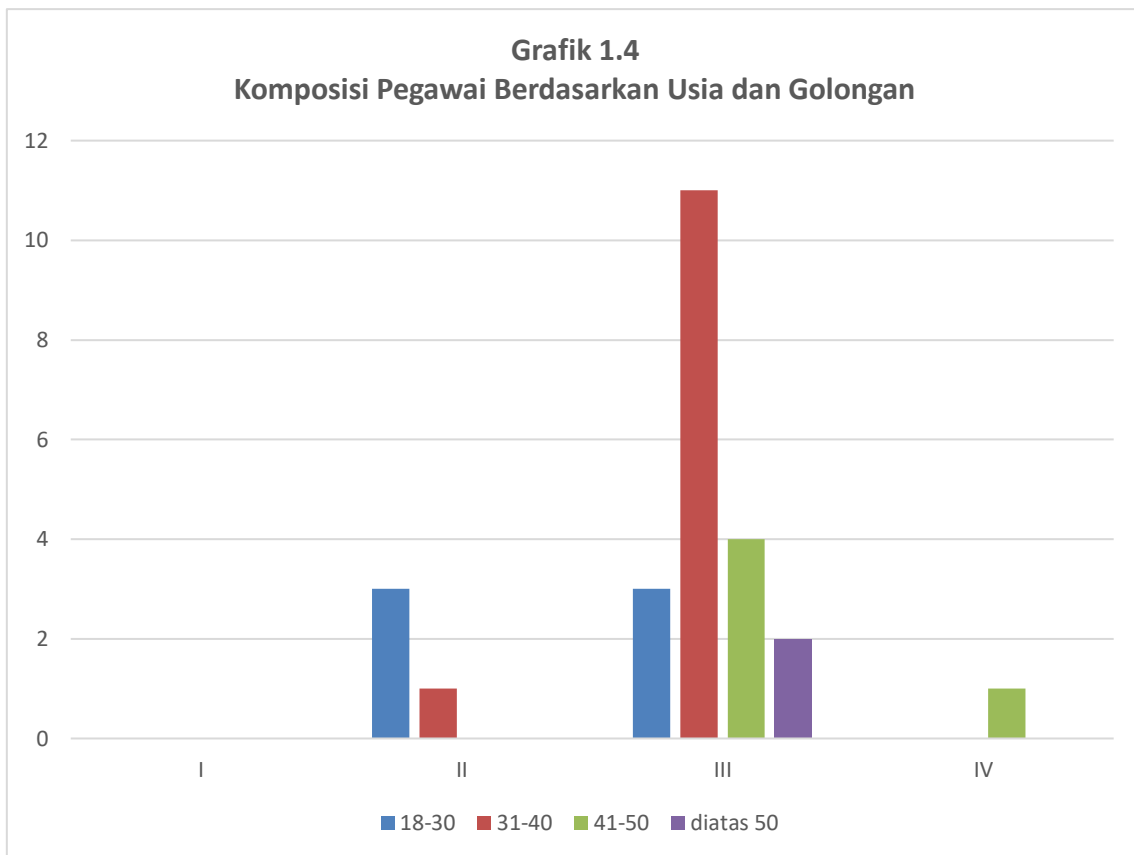
PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SLTA	0	0	2	0	2
D1	0	1	0	0	1
D3	0	3	0	0	3
D4/S1	0	0	14	0	14
S2	0	0	4	1	5
JUMLAH	0	4	20	1	25



IV. Berdasarkan Usia dan Golongan :

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia dan Golongan

KELOMPOK UMUR	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	3	3	0	6
31-40	0	1	11	0	12
41-50	0	0	4	1	5
diatas 50	0	0	2	0	2
JUMLAH	0	4	20	1	25



B. Peran Strategis KPKNL Pematang Siantar

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Pematang Siantar memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Pematang Siantar turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Pematang Siantar selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Penilaian

Penilaian terhadap Kekayaan Negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN. Dengan demikian pengelolaan kekayaan negara, menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik

berfungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "mindset" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Setelah berlakunya PMK Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, lelang dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. Hal ini tentu saja semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh KPKNL Pematang Siantar adalah penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN. Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Permasalahan Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan, pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan seluruh Sasaran Strategis dapat tercapai dengan nilai indeks maksimal di atas 100% sehingga dapat menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,43%. Dari 20 (dua puluh) total Indikator Kinerja Utama (IKU) pada KPKNL Pematang Siantar, terdapat 12 (dua belas) IKU yang memiliki nilai indeks maksimal senilai 120%.

D. Sistematika laporan

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

BAB	I	Pendahuluan
BAB	II	Perencanaan Kinerja
BAB	III	Akuntabilitas Kinerja
BAB	IV	Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selama tahun 2022 KPKNL Pematang Siantar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Perencanaan strategis ditetapkan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang saat ini dihadapi maupun yang akan timbul.

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

"Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam rangka mendukung visi tersebut, strategi yang ditetapkan KPKNL Pematang Siantar dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara
 - a. Implementasi basis akrual dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bahan untuk menyusun LKPP.
 - b. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN dan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
 - c. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
 - d. Percepatan sertifikasi BMN.
2. Peningkatan kualitas pelayanan
 - a. Penerapan regulasi dan pedoman di bidang penilaian.
 - b. Standardisasi pelayanan penilaian pada instansi vertikal.
 - c. Pengawasan dan pembinaan penilai pemerintah.
 - d. Pengembangan riset data dan informasi penilaian.
3. Optimalisasi pengurusan piutang negara
 - a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN diatas 1 Milyar.
 - b. Optimalisasi tahap pengurusan.
 - c. Penggalian potensi pengurusan piutang negara.

4. Peningkatan pelayanan lelang
 - a. Modernisasi lelang melalui e-auction
 - b. Penguatan jabatan fungsional Pelelang.
 - c. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang.
5. Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal.
 - b. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai.
 - c. Penerapan TIK yang komprehensif.
 - d. Penerapan sistem informasi sesuai core bussiness.
 - e. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
 - f. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
 - g. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja KPKNL Pematang Siantar tahun 2022 sesuai dengan peta strategis *Kemenkeu Three* terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja berdasarkan Peta Strategis KPKNL Pematang Siantar Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS 1			
PENINGKATAN KONTRIBUSI KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TERHADAP PEREKONOMIAN			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Kualitas/Mutu
1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	% Rupiah	100%	100
a. PNBPN Pengelolaan BMN		a. Rp2.050.000.000,00	
b. PNBPN Piutang Negara		b. Rp5.625.000,00	
c. PNBPN Lelang		c. Rp1.900.000.000,00	
2. Persentase Produktivitas Lelang	%	36%	100

SASARAN STRATEGIS 2 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Kualitas/Mutu
1. Persentase Realisasi Pokok Lelang a. Pokok Lelang Kelas I b. Pokok Lelang Pegadaian	% Rupiah	100% a. Rp20.000.000,00 b. Rp42.000.000,00	100
2. Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	%	100%	100

SASARAN STRATEGIS 3 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Kualitas/Mutu
1. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	Indeks	4,77	100

SASARAN STRATEGIS 4 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG OPTIMAL			
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Kualitas/Mutu
1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	65%	100
2. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	%	100%	100
3. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	%	100%	100
4. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100%	100

SASARAN STRATEGIS 5 PELAKSANAAN PENILAIAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Kualitas/Mutu
1. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	19%	100

SASARAN STRATEGIS 6 PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Kualitas/Mutu
1. Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	%	92%	100
2. Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN a. Deviasi Data PNBPN Lelang b. Deviasi Data PNBPN Piutang Negara	%	10% a. 10% b. 10%	100

SASARAN STRATEGIS 7 EDUKASI YANG EFEKTIF

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Kualitas/Mutu
1. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	Indeks	90	100

SASARAN STRATEGIS 8 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Kualitas/Mutu
1. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	%	85%	100

SASARAN STRATEGIS 9 SDM YANG KOMPETEN

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Kualitas/Mutu
1. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	100%	100

SASARAN STRATEGIS 10 ORGANISASI YANG FIT FOR PURPOSE

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Kualitas/Mutu
1. Nilai Pemenuhan Unit kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	Indeks	85	100
2. Nilai <i>Review</i> Pengelolaan Kinerja	Indeks	80	100
3. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	Indeks	90	100

SASARAN STRATEGIS 11 PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN YANG OPTIMAL

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Kualitas/Mutu
1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	95,5%	100
2. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	%	100%	100

Untuk menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan dikelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. Mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan.
2. Memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan nonfinansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang
3. Memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang.
4. Memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi *Kemenkeu-three* Tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Peta Strategi KPKNL

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat



Peta strategi *Kemenkeu-three* Tahun 2022 mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap

pertumbuhan ekonomi. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian memiliki 2 (dua) IKU, yaitu :

- a. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
- Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan strategis pengukuran IKU ini adalah dalam rangka optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari :

✓ PNBPN PENGELOLAAN BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas :

- penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- pemanfaatan barang milik negara; dan
- pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara. Adapun target PNBPN Pengelolaan BMN pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.900.000.000,00.

✓ PNBPN PIUTANG NEGARA (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. Adapun target PNBPN Pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun

2022 adalah sebesar Rp5.625.000,00, kemudian setelah addendum menjadi Rp7.500.000,00.

✓ **PNBP LELANG**

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian,
- bea lelang batal atas permintaan penjual,
- biaya permohonan lelang,
- uang jaminan pembeli wanprestasi, dan
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Adapun target PNBP Lelang pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.050.000.000,00.

b. **Persentase Produktivitas Lelang**

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Tujuan strategis pengukuran IKU Persentase Produktivitas Lelang adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Adapun target IKU Persentase Produktivitas Lelang pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah sebesar 36%.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa memiliki 2 (dua) IKU, yaitu :

a. **Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Lelang merupakan penjualan yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan didahului adanya pengumuman lelang. Pelayanan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari terwujudnya harga transaksi lelang yang kompetitif serta meningkatnya kontribusi bagi penerimaan negara. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan

penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Tujuan Strategis pengukuran IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Adapun target IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang pada tahun 2022 adalah Rp 62.000.000.000 atau 100% dengan komponen sebagai berikut:

- ✓ Pada komponen pokok lelang kelas I, target tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000.000.
- ✓ Pada komponen pokok lelang pegadaian, target tahun 2022 sebesar Rp 42.000.000.000.

b. Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

IKU Tingkat *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan *outstanding* masing-masing KPKNL di wilayahnya. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- ✓ Angsuran
- ✓ Pelunasan
- ✓ Penarikan/ Pengembalian
- ✓ Pelunasan
- ✓ PSBDT
- ✓ Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2022.

Adapun target IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah Rp92.000.000,00, kemudian setelah addendum menjadi Rp330.000.000,00.

3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah ukuran untuk mengetahui apresiasi masyarakat khususnya pengguna jasa di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang atas pelayanan yang diberikan oleh KPKNL. Kualitas layanan dapat dikatakan optimal adalah ketika layanan yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan. Kepuasan pengguna layanan DJKN yang tinggi tercermin dari tingginya nilai kepuasan dan harapan pengguna jasa atas seluruh layanan DJKN yang diberikan. Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi memiliki 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL yang diukur dengan melaksanakan survei yang berbasis indeks. Adapun target IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada KPKNL Pematang Siantar untuk tahun 2022 adalah 4,77.

4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara meliputi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-Lain (KNL), Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang. Kegiatan Pengelolaan Kekayaan Negara meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b. pengurusan piutang negara; dan

c. pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBP (*revenue generating*).
- c. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d. Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal memiliki 4 (empat) IKU, yaitu:

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Optimalisasi yang dilakukan dapat berupa Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, atau Optimalisasi Lainnya (seperti penyerahan kepada pengelola sebagai BMN *Idle*, Rehabilitasi untuk BMN Rusak Berat, dan Penghapusan). IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 memiliki target sebesar 65% yang terdiri atas:

- ✓ Tingkat kesesuaian SBSK K/L Baru (2022) dengan target sebesar 75%, dan
- ✓ Monitoring dan evaluasi kesesuaian SBSK Tahun 2020 dan 2021 dengan target sebesar 25%.

b. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemsertifikatan BMN berupa Tanah. IKU terkait sertifikasi tanah merupakan program pemerintah dalam rangka pengamanan BMN. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel adalah pengamanan kekayaan negara yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah atau peraturan yang berlaku dan

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pengelolaan. Pengamanan kekayaan negara yang akuntabel dilaksanakan melalui penyelesaian verifikasi atas hasil identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- ✓ Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- ✓ Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
- ✓ Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- ✓ K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
- ✓ Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- ✓ Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN. Tujuan Strategis IKU ini adalah untuk mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian. Adapun target IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah 440 bidang tanah.

c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang negara (BKPN)

IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang negara (BKPN) menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Tujuan IKU ini adalah dalam rangka percepatan penyelesaian *outstanding* piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Adapun target IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang negara (BKPN) pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah sebanyak 14 BKPN atau sebesar 100%.

d. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Tujuan strategis IKU ini adalah untuk mewujudkan struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang. IKU ini difokuskan hanya pada BMN yang berupa tanah dan tanah/bangunan dengan tahapan identifikasi dan inventarisasi aset tanah/bangunan yang akan dievaluasi kinerjanya, pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, survei, dan data sekunder, pengolahan data menggunakan aplikasi portofolio, pelaporan evaluasi kinerja portofolio aset serta tindak lanjut evaluasi portofolio untuk perubahan struktur portofolio. Target IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah 100% atau 220 NUP yang terdiri atas:

- ✓ Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN sebanyak 50 NUP, dan
- ✓ Target/Realisasi Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi sebanyak 170 NUP.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional memiliki 1 (satu) IKU, yaitu Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara

nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Tujuan strategis IKU ini adalah Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN. Adapun Target IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah sebesar 19%.

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif memiliki 2 (dua) IKU, yaitu:

a. Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- ✓ Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- ✓ *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Tujuan strategis IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* adalah:

- ✓ menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang;
- ✓ memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun;
- ✓ menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif;
- ✓ menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBP lelang; dan
- ✓ perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Adapun target IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah 92%.

b. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- ✓ Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- ✓ Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 10% sedangkan Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%.

7. Edukasi yang Efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

- a. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
- b. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas tingkat pemahaman, kualitas materi, kualitas fasilitator, serta kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali). Tujuan strategis IKU ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN dan mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat. Sasaran Strategis Edukasi yang Efektif memiliki 1 (satu) IKU yaitu Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi. Adapun target IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah 90.

8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN.
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif memiliki 1 (satu) IKU yaitu Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara dengan target Tahun 2022 sebesar 85%. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan

pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang. Tujuan strategis IKU ini adalah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengelola barang serta meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L.

9. SDM yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Tujuan dari pembentukan SDM yang kompeten ini adalah menyediakan pegawai yang berkompoten sesuai dengan kebutuhan organisasi serta mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat juga untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan serta mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Sasaran strategis SDM yang Kompeten memiliki 1 (satu) IKU yaitu Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai. Pengukuran dilakukan dengan pemenuhan *standard* kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (teknis/manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2022. Adapun target IKU dimaksud untuk tahun 2022 adalah 100%. Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

10. Organisasi yang *Fit For Purpose*

Organisasi yang *Fit For Purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Organisasi yang *Fit For Purpose* tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebuah organisasi yang *Fit For Purpose* harus mengutamakan kebutuhan *stakeholder* terkait pelayanan yang diberikan oleh KPKNL. Pelayanan dimaksud juga sebisa mungkin terhindar dari kesalahan dan pelanggaran untuk kepentingan kepuasan *stakeholder*. Tujuan sasaran strategis organisasi yang *fit-for-purpose* adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Sasaran Strategis Organisasi yang *Fit For Purpose* memiliki 3 (tiga) IKU yaitu:

a. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI Menuju WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional. Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16. Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang

diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18. Adapun target IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI Menuju WBBM pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah 85.

b. Nilai Review Pengelolaan Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi. Tujuan strategis IKU Nilai Review Pengelolaan Kinerja adalah untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Adapun target IKU Nilai Review Pengelolaan Kinerja pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah 80.

c. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan *feedback* peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang

dilaksanakan. Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan *Forum Group Discussion*. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini. Adapun Target IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah 90.

11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu. Tujuan Strategis IKU ini adalah memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019. Adapun target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah 95,5%.

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

✓ Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari:

▪ Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan

▪ Persentase Validitas dan Completeness Master Aset

Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi.

✓ Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan

Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan berfokus pada dukungan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) merupakan Indeks yang diukur oleh LKPP yang terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. Dalam mendukung capaian ITKP dengan target minimal baik di tahun 2023 maka diperlukan indikator dukungan ITKP yakni Persentase Dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

▪ SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target.

- e-Tendering
Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.
- e-Purchasing
Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.
- Non e-Tendering dan Non e-Purchasing
Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.
- e-Kontrak
Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai. Tujuan Strategis IKU ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan. Adapun target IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah 100%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022, terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar Tahun 2022 telah memperoleh hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematang Siantar sebesar 115,43%.

Adapun rincian capaian kinerja atas 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Three* KPKNL Pematang Siantar Tahun 2022 dapat dijelaskan sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja KPKNL Pematang Siantar Tahun 2022

Kode	IKU	V/C	Target 2022	Realisasi 2022	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (25%)					30,00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian					120,00%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	135,13%	135,13%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	45,15%	125,43%	120,00%	hijau
	Customer Perspective (15%)					16,70%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					120,00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	166,31%	166,31%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	270,84%	270,84%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi					102,73%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,77	4,90	102,73%	102,73%	hijau
	Internal Process Perspective					34,30%	

	(30%)						
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					118,66%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	90,66%	139,47%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	115,91%	115,91%	115,91%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	128,57%	128,57%	120,00%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	122,00%	122,00%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,50%	197,37%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					114,35%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	200,00%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif					109,83%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90	98,85	109,83%	109,83%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif					108,82%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	92,50%	108,82%	108,82%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)					34,43%	
9	SDM yang Kompeten					120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose					114,17%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	P/M	85	95,44	112,28%	112,28%	hijau
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	99,00	123,75%	120,00%	hijau

10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	99,21	110,23%	110,23%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal					110,12%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,73%	100,24%	100,24%	hijau
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	204,00%	204,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)							115,43%

1. Evaluasi Kinerja Tahun 2022

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Three* Tahun 2022 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu-Three* Tahun 2022 sebagai berikut:

1.1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian

IKU 1.1.1 : Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara berasal dari PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang. Untuk realisasi persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang s.d. 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.345.076.194 atau 135,13% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal. Masing-masing capaiannya pada tahun 2022 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Per 31 Desember 2022

Uraian	Target Awal Tahun 2021	Target Addendum	Realisasi
Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang			
a. PNBPN Pengelolaan BMN	Rp 2.050.000.000	Rp 2.050.000.000	Rp 2.658.277.217
b. PNBPN Piutang Negara	Rp 5.625.000	Rp 7.500.000	Rp 10.119.425
c. PNBPN Lelang	Rp 1.900.000.000	Rp 1.900.000.000	Rp 2.676.679.552
Capaian IKU			135,13%

IKU 1.1.2 : Persentase Produktivitas Lelang

IKU persentase produktifitas lelang merupakan perbandingan antara jumlah realisasi frekuensi lelang laku dengan jumlah realisasi frekuensi lelang dalam setahun. Jumlah realisasi frekuensi lelang laku secara keseluruhan pada tahun 2022 adalah 197 dengan jumlah realisasi frekuensi lelang secara keseluruhan adalah 433 sehingga menghasilkan persentase 45,50%. Capaian IKU ini pada tahun 2022 adalah sebesar 45,15% atau sebesar 125,43% dengan indeks tanpa batas dengan target 36%, dimana masing-masing capaiannya pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Produktivitas Lelang Per 31 Desember 2022

No.	Rincian IKU	Target 2022	Realisasi 2022
1.	Jumlah Frekuensi Lelang		433
2.	Jumlah Frekuensi Lelang Laku		197
		36%	45,15%
Capaian IKU		125,43%	

1.2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

IKU 1.2.1 : Persentase Realisasi Pokok Lelang

IKU berupa persentase realisasi pokok lelang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Pokok Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian. Capaian IKU pada tahun 2022 untuk IKU persentase realisasi pokok lelang adalah sebesar 166,31% dengan Indeks Tanpa Batas dengan nilai Rp103.109.295.730,00 Masing-masing capaiannya pada tahun 2022 dapat dilihat pada pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Hasil Lelang (Pokok Lelang) Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1.	Pokok Lelang Kelas I	Rp 20.000.000.000	Rp 38.365.341.230	
2.	Pokok Lelang Pegadaian	Rp 42.000.000.000	Rp 64.743.954.500	
Capaian IKU				166,31%

IKU 1.2.2 : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU tingkat penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDS s.d 2017) merupakan IKU yang bertujuan untuk mengurangi saldo outstanding piutang negara yang SP3N-nya terbit s.d 31 Desember 2017. Sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Pematang Siantar pada awal tahun 2022, target tingkat penurunan outstanding piutang negara adalah sebesar Rp 92.000.000,00 kemudian setelah diaddendum menjadi Rp 330.000.000,00. Realisasi IKU ini s.d. 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 893.757.155,00 dengan persentase sebesar 270,84% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

Tabel 3.5
Realisasi Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d 2017)
Per 31 Desember 2022

Uraian	Target Awal Tahun 2021	Target Addendum	Realisasi	Capaian IKU
Tingkat penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDS s.d 2017)	Rp 92.000.000,00	Rp 330.000.000,00	Rp 893.757.155,00	270,84%

1.3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

IKU 1.3.1 : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

Target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Pematang Siantar tahun 2022 ditetapkan sebesar 4,77. Adapun realisasi IKU tahun 2022 adalah sebesar 4,90 atau 102,73%.

1.4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

IKU 1.4.1 : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Kekayaan Negara Lain-lain (KNL), Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*); 2) Adanya

nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNBP (*revenue generating*); 3) Tingginya *turn over* penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); 4) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu tingkat kesesuaian SBSK K/L baru tahun 2022 dengan bobot nilai 75% dan monev tingkat kesesuaian SBSK tahun 2020 dan 2021 dengan bobot nilai 25%. Target keseluruhan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK untuk tahun 2022 sebesar 65%. Untuk realisasi s.d 31 Desember 2022 sebesar 139,47% dengan Indeks Tanpa Batas.

IKU 1.4.2 : Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Realisasi Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan pada tahun 2022 adalah 510 bidang tanah dengan target pada awal tahun 2022 sebesar 440 bidang tanah. Dengan demikian capaian IKU tercatat sebesar 115,91%.

IKU 1.4.3 : Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Realisasi Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada tahun 2022 adalah 18 BKPN dengan target pada awal tahun 2022 tanpa addendum adalah 14 BKPN. Dengan demikian capaian IKU tercatat sebesar 128,57% dari target 100% pada tahun 2022.

IKU 1.4.4 : Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) pada tahun 2022 adalah sebesar 254 NUP dari target pada awal tahun 2022 tanpa adendum adalah 220 NUP. Dengan demikian capaian IKU tercatat sebesar 122%.

1.5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

IKU 1.5.1 : Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Realisasi Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian pada tahun 2022 adalah sebesar 0,50% dari target pada tahun 2022 adalah 19% dengan persentase sebesar 197,37% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

1.6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

IKU 1.6.1 : Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*

Target Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* tahun 2022 adalah 92% dengan realisasi adalah sebesar 108,70%, dengan jumlah relisasi frekuensi *e-auction* sebanyak 433 dan *e-conventional auction* sebanyak 0 dari 433 frekuensi lelang secara keseluruhan. Dengan demikian terkait capaian IKU ini adalah sebesar 108,70%.

IKU 1.6.2 : Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- a. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN tahun 2022 adalah 10%, target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang tahun 2022 adalah 10%, sehingga rata-rata target tahun 2022 adalah 10%. Adapun realisasi deviasi data PNBPN Fungsional DJKN pada tahun 2022 adalah sebesar 0% dari target pada tahun 2022 adalah 102% dengan persentase sebesar 200% dengan indeks tanpa batas atau sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

1.7. Edukasi yang Efektif

IKU 1.7.1 : Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2022 mencapai 98,85 poin dari target yang ditetapkan sebesar 90 poin atau tercapai dengan indeks 109,83% dari indeks batas maksimal.

1.8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

1.8.1 : Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Realisasi Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara tahun 2022 sebesar 92,50% dengan target 85%. Dengan demikian, capaian IKU persentase tindak lanjut pengelolaan aset adalah sebesar 108,82% dengan indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal, dimana masing-masing capaiannya pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Aset Per 31 Desember 2022

No.	Uraian IKU	Target 2022	Realisasi 2022
1.	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L		18
2.	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L		19
3.	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021		19
4.	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022		21
		85%	92,50%
Capaian IKU		108,82%	

1.9. SDM yang Kompeten

IKU 1.9.1 : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tahun 2022 mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dimana jumlah bawahan yang memenuhi kriteria adalah 25 pegawai dan jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria adalah 25 pegawai dengan jumlah bawahan total 25 pegawai. Salah satu penyebab IKU ini dapat tercapai maksimal karena pelaksanaan diklat dilakukan baik secara mandiri melalui KLC Kementerian Keuangan maupun melalui pemanggilan diklat yang dilakukan setiap bulannya.

1.10. Organisasi yang *Fit For Purpose*

IKU 1.10.1 : Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI Menuju WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18.

Realisasi IKU terkait nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM adalah sebesar 95,44 dengan target yang ditetapkan sebesar 85. Dengan demikian menghasilkan persentase sebesar 112,28% dengan indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.

IKU 1.10.2 : Nilai Review Pengelolaan Kinerja

Capaian IKU terkait Nilai Review Pengelolaan Kinerja pada tahun 2022 adalah 99 dari target yang ditetapkan sebesar 80 yang berarti persentase capaian terhadap IKU ini adalah sebesar 123,75% dengan indeks tanpa batas atau 120% dengan indeks batas maksimal.

IKU 1.10.3 : Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Capaian IKU terkait indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator pada tahun 2022 adalah 99,21 dari target yang ditetapkan sebesar 90. Dengan

demikian menghasilkan persentase sebesar 110,23% dengan indeks tanpa batas maupun dengan indeks batas maksimal.

1.11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

IKU 1.11.1 : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Ketentuan perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) pada tahun 2022 berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah:

- a. Capaian IKU PKPA untuk triwulan I s.d III mengacu pada capaian IKPA Januari s.d triwulan periode pelaporan. Dengan demikian, capaian IKU PKPA untuk triwulan I s.d III sama dengan nilai IKPA yang disajikan pada OM SPAN.
- b. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot masing-masing, yaitu SMART 60% dan IKPA 40%.

Realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar 95,73% dari target yang ditetapkan yaitu 95,5% atau sebesar 100,24% dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.

IKU 1.11.2 : Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai. Realisasi IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada KPKNL Pematang Siantar untuk Tahun 2022 adalah 204% dari target sebesar 100%.

2. Evaluasi Kinerja 2020-2022

Gambaran kinerja KPKNL Pematang Siantar selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat diketahui dengan cara membandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejenis yang terdapat dalam Kontrak Kinerja KPKNL Pematang Siantar Tahun 2022 s.d 2 (dua) tahun terakhir, baik berupa perbandingan target dan realisasi kinerja yang dituangkan dalam bentuk tabel maupun perbandingan capaian kinerja dalam bentuk grafik. Perbandingan dimaksud antara lain sebagai berikut:

2.1. IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang atau IKU Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2022	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 3.957.500.000)	135,13% (Rp 5.345.076.194)
2021	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 4.113.600.000)	105,58% (Rp 4.349.770.624)
2020	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp 4.882.053.120)	78,33% (Rp 3.824.089.766)

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang atau IKU manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2020 sebesar 100% dengan nilai Rp 4.882.053.120 dan realisasi 78,33% dengan nilai Rp 3.824.089.766. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 100% dengan nilai Rp 4.113.600.000 dan realisasi 105,58% dengan nilai Rp 4.349.770.624. Pada Tahun 2022, target IKU tersebut 100% dengan nilai Rp Rp 3.957.500.000 dan realisasi 135,13% dengan nilai Rp 5.345.076.194. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2022 dengan nilai 135,13%.



2.2. IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2022	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,77	4,90
2021	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,77	4,88
2020	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,75	4,87

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU indeks kepuasan pengguna layanan di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2020 adalah 4,75 dengan realisasi 4,87 sehingga capaian 102,53%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 4,77 dengan realisasi 4,88 sehingga capaian 102,31%. Pada tahun 2022, target IKU tersebut 4,77 dengan realisasi 4,90 sehingga capaian 102,73%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2022 dengan nilai 102,73% dan capaian terendah ada pada tahun 2021 dengan nilai 102,31% seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini:



2.3. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang atau IKU Persentase Hasil Lelang

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2022	Persentase realisasi pokok lelang	Rp 62.000.000.000	Rp 103.109.295.730
2021	Persentase realisasi pokok lelang	Rp 74.000.000.000	Rp 82.726.826.913
2020	Persentase hasil lelang (pokok lelang)	Rp 43.373.625.199	Rp 64.418.876.798

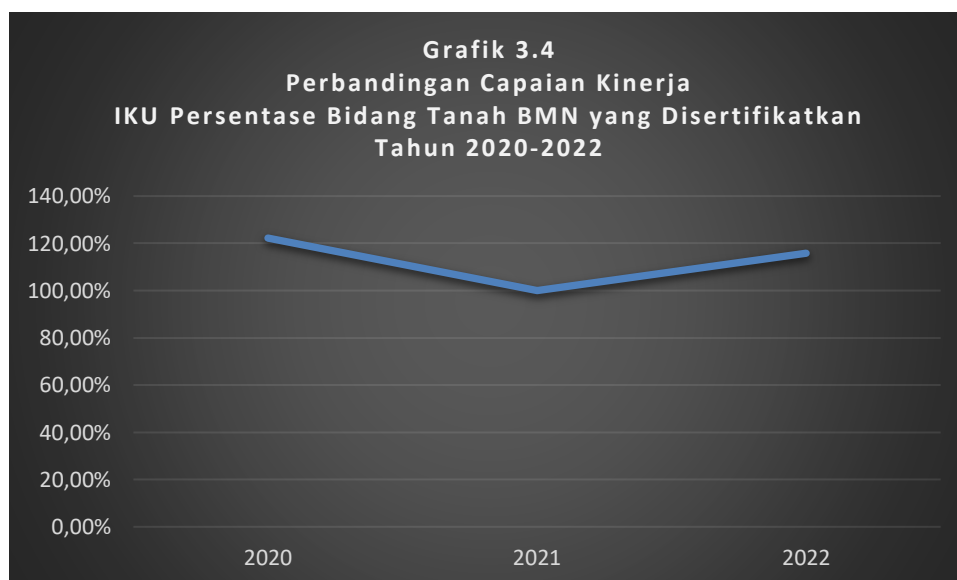
Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang atau IKU Persentase Hasil Lelang di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU hasil lelang pada tahun 2020, target IKU tersebut Rp 43.373.625.199 dengan realisasi Rp 64.418.876.798 sehingga capaian 112,95%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut Rp 74.000.000.000 dengan realisasi Rp 82.726.826.913 sehingga capaian 111,79%. Pada Tahun 2022, target IKU tersebut Rp 62.000.000.000 dengan realisasi Rp 103.109.295.730 sehingga capaian 166,31%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2022 dengan nilai 166,31% dan capaian terendah ada pada tahun 2021 dengan nilai 111,79% seperti yang terlihat pada grafik berikut:



2.4. IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2022	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	440	510
2021	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	259	259
2020	Persentase bidang tanah BMN yang telah disertifikatkan	36	44

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan pada tahun 2020 adalah 36 NUP dengan realisasi 44 NUP sehingga capaian 122,22%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 275 NUP setelah diaddendum menjadi 259 NUP dengan realisasi 259 NUP sehingga capaian 100%. Pada tahun 2022, target IKU tersebut sebanyak 440 NUP dengan realisasi 510 NUP sehingga capaian 115,91%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2020 dengan nilai 122,22% dan pada tahun 2022 mendapat capaian sebesar 115,91% seperti yang terlihat pada grafik berikut:



2.5. IKU Persentase Produktivitas Lelang

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2022	Persentase produktifitas lelang	36%	45,15%
2021	Persentase produktifitas lelang	35%	39,16%
2020	Persentase produktifitas lelang	34%	37,43%

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase produktivitas lelang di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU persentase persentase produktivitas lelang pada tahun 2020 adalah 34% dengan realisasi 37,43% sehingga capaian 110,09%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 35% dengan realisasi 39,16% sehingga capaian 111,89%. Pada tahun 2022, target IKU tersebut 36% dengan realisasi 45,15% sehingga capaian 125,43%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2022 dengan nilai 125,43% dan capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 110,09% seperti yang terlihat pada grafik berikut :



2.6. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-conventional Auction*

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2022	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%	100%
2021	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92%	100%
2020	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	90%	100%

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase pelaksanaan *e-auction* dan *e-conventional auction* di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU persentase pelaksanaan *e-auction* pada tahun 2020 adalah 90% dengan realisasi 100% sehingga capaian 111,11%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 92% dengan realisasi 100% sehingga capaian 108,70%. Pada tahun 2022, target dan realisasi IKU sama dengan tahun 2021, yaitu target IKU sebesar 92% dengan realisasi 100% sehingga capaian 108,70%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2020 dengan nilai 111,11% dan capaian yang sama antara tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 108,70% seperti yang terlihat pada grafik berikut:



2.7. IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2022	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	90	98,85
2021	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	90	96,16
2020	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	89	94

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2020, target IKU tersebut 89 dengan realisasi 94 sehingga capaian 105,61%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 90 dengan realisasi 96,16 sehingga capaian 106,84%. Pada tahun 2022, target IKU tersebut 90 dengan realisasi 98,85 sehingga capaian 109,83%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian IKU meningkat dari tahun ke tahun, dimulai pada tahun 2020 dengan nilai 105,61% kemudian pada tahun 2021 sebesar 106,84% dan terakhir pada tahun 2022 dengan nilai 109,83% seperti yang terlihat pada grafik di berikut:



2.8. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2022	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%
2021	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%
2020	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2020 adalah 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian 120%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian 120%. Pada tahun 2022, target IKU tersebut 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian 120%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian IKU tersebut stabil dimana pada pada tahun 2020 sampai dengan 2022 konsisten dengan nilai 120% seperti yang terlihat pada grafik berikut:



2.9. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2022	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,73%
2021	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,91%
2020	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	96,48%

Dari tabel perbandingan target dan realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran di atas, dapat dilaporkan bahwa target IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2020 adalah 95% dengan realisasi 96,48% sehingga capaian 101,55%. Pada tahun 2021, target IKU tersebut 95,5% dengan realisasi 95,91% sehingga capaian 100,43%. Pada tahun 2022, target IKU tersebut 95,5% dengan realisasi 95,73% sehingga capaian 100,24%. Dari perbandingan tersebut, diperoleh kesimpulan capaian tertinggi IKU tersebut ada pada tahun 2020 dengan nilai 101,55% dan capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 100,24% seperti yang terlihat pada grafik berikut:



B. Realisasi Anggaran

Untuk pembiayaan satuan kerja di lingkungan KPKNL Pematang Siantar dalam Tahun 2022 telah dialokasikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia dengan pagu sebesar Rp 1.726.635.000 setelah revisi dan penghematan (*self blocking*) yang dilakukan sepanjang tahun 2022 direalisasikan penyerapan anggaran atas pagu tersebut sebesar Rp 1.560.148.358 atau mencapai 90,35%.

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa komponen perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) terdiri dari capaian IKPA dengan bobot 40% dan capaian SMART dengan bobot 60%, maka untuk mengetahui salah satu capaian komponen, yaitu IKPA harus dilakukan perhitungan beberapa indikator IKPA, seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output sehingga didapatkan total nilai akhir IKPA sebesar 100%. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan SMART yang terdiri dari capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan, dan penyerapan anggaran sehingga menghasilkan nilai SMART sebesar 92,89%. Selanjutnya, nilai akhir IKPA diberi bobot 40% dengan capaian 100% dan nilai SMART diberi bobot 60% dengan capaian 92,89% diperoleh nilai SMART DJA sebagai hasil proyeksi IKU PKPA untuk penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal sebesar 95,73%. Nilai tersebut sekaligus sebagai realisasi IKU kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Pematang Siantar tahun 2022 seperti digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.16			
Indikator IKPA Tahun 2022			
Indikator IKPA	s.d Triwulan IV Tahun 2022		
	Bobot Indikator IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Revisi DIPA	10%	100%	10%
Deviasi Halaman III DIPA	10%	100%	10%
Penyerapan Anggaran	20%	100%	20%
Belanja Kontraktual	10%	100%	10%
Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10%
Pengelolaan UP dan TUP	10%	100%	10%

Dispensasi SPM	5%	100%	5%
Capaian Output	25%	100%	25%
Total	100%		100%
Total Nilai Akhir IKPA	100%		

Tabel 3.17					
Proyeksi IKU PKPA Tahun 2022					
Kegiatan	IKPA		Smart DJA		Nilai Smart DJA
	Bobot	Capaian	Bobot	Capaian	
IKU PKPA	40,00%	100%	60,00%	92,89%	95,73%

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Pematang Siantar sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintah. Penyusunan laporan untuk mengetahui kinerja yang telah dilaksanakan guna mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja dapat digambarkan hasil yang telah dicapai untuk setiap sasaran sebagai berikut :

1. Realisasi berupa Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang berasal dari PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang s.d. 31 Desember 2022 adalah sebesar 135,13% dari target tahun 2022 sebesar 100% dengan rincian capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut :
 - a. Capaian PNBPN Pengelolaan BMN sebesar Rp 2.658.277.217.
 - b. Capaian PNBPN Piutang Negara sebesar Rp 10.119.425.
 - c. Capaian PNBPN Lelang sebesar Rp 2.676.679.552.
2. Realisasi berupa Persentase Produktifitas Lelang s.d 31 Desember 2022 sebesar 45,15% dari target 36% dengan rincian 197 frekuensi lelang laku dari 433 frekuensi lelang secara keseluruhan sehingga menghasilkan capaian sebesar 120%.
3. Realisasi berupa Persentase Realisasi Pokok Lelang yang berasal dari Pokok Lelang Kelas I dan Pegadaian s.d. 31 Desember 2022 adalah sebesar 166,31% dengan nilai Rp 103.109.295.730 dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau Rp 62.000.000.000.
4. Realisasi berupa Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara (saldo PNDS s.d 2017) s.d. 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 893.757.155 dan menghasilkan capaian sebesar 270,84%.
5. Realisasi berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Pematang Siantar tahun 2022 adalah sebesar 4,90 dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,77. Dengan demikian capaian IKU tersebut sebesar 102,73%.
6. Realisasi berupa Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK s.d. 31 Desember 2022 adalah sebesar 90,66% dengan target sebesar 65%.
7. Realisasi berupa Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan s.d 31 Desember 2022 adalah 510 bidang tanah dengan capaian sebesar 115,91% dengan target 100%.

8. Realisasi berupa Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada KPKNL Pematang Siantar s.d 31 Desember 2022 adalah 18 BKPN dari target tahun 2022 sebesar 14 BKPN dengan capaian sebesar 128,57% atau mencapai 120% dengan indeks batas maksimal.
9. Realisasi berupa Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) s.d 31 Desember 2022 sebanyak 254 NUP dari target tahun 2022 adalah 220 NUP. Dengan demikian, capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) adalah sebesar 122%.
10. Realisasi berupa Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian s.d 31 Desember 2022 adalah sebesar 0,50% dari target 19% dengan persentase sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.
11. Realisasi berupa Persentase Pelaksanaan Lelang *E-auction* dan *E-conventional Auction* s.d 31 Desember 2022 adalah sebesar 100% dari target 92% sehingga menghasilkan capaian 108,70%.
12. Realisasi berupa Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN s.d 31 Desember 2022 adalah sebesar 0% dari target pada tahun 2022 adalah 10%. Dengan demikian diperoleh capaian sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.
13. Realisasi berupa Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi s.d 31 Desember 2022 tercapai sebesar 98,85 poin dari target yang ditetapkan sebesar 90 poin atau tercapai dengan indeks 109,83% dari indeks batas maksimal.
14. Realisasi berupa Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara s.d 31 Desember 2022 sebesar 92,50% dengan target 85%. Dengan demikian, capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara adalah sebesar 108,82% dengan indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.
15. Realisasi berupa Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai s.d 31 Desember 2022 mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga menghasilkan capaian sebesar 120%.
16. Realisasi Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM s.d 31 Desember 2022 adalah sebesar 95,44 dari target yang telah ditetapkan sebesar 85. Dengan demikian dihasilkan persentase sebesar 112,28%.
17. Realisasi berupa Nilai *review* Pengelolaan Kinerja s.d 31 Desember 2022 adalah 99 dari target yang ditetapkan sebesar 80. Dengan demikian, capaian IKU Nilai *review* Pengelolaan Kinerja adalah sebesar 123,75% dari indeks tanpa batas atau 120% dengan indeks batas maksimal.
18. Realisasi berupa Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator s.d 31 Desember 2022 adalah 99,21 dari target yang ditetapkan sebesar 90. Dengan

demikian, capaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator adalah sebesar 110,23% dengan indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.

19. Realisasi berupa Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d 31 Desember 2022 adalah sebesar 95,73% dari target yang ditetapkan yaitu 95,5% atau sebesar 100,24% dari indeks tanpa batas maupun indeks batas maksimal.
20. Realisasi berupa Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan s.d 31 Desember 2022 adalah 204% dari target sebesar 100% sehingga menghasilkan capaian sebesar 120% dengan indeks batas maksimal.

Dari 20 (dua puluh) IKU sebagai penjabaran dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Pematang Siantar, dapat disimpulkan seluruh IKU berstatus hijau, sehingga Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pematang Siantar Tahun 2022 sebesar 115,43%.

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun Mendatang

Dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, KPKNL Pematang Siantar mempunyai beberapa strategi, antara lain:

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Untuk IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP Pengelolaan BMN), strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah mendorong satuan kerja K/L agar mengajukan permohonan pemanfaatan/sewa dan mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN terutama BMN dengan kondisi rusak berat kepada Pengelola Barang.

2. Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah

Untuk IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah melakukan koordinasi dengan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara terkait adanya perbedaan nilai antara nilai yang disetujui oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari permohonan satuan kerja dengan nilai wajar hasil penilaian.

3. Seksi Piutang Negara

a. Untuk IKU PNBP Piutang Negara dan IKU tingkat penurunan outstanding piutang negara (saldo PNDP s.d 2017), strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah melakukan penagihan secara *on the spot* ke lapangan untuk Piutang Negara yang nilainya masih potensial.

- b. Untuk IKU efektivitas penyelesaian BKPN, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah melakukan percepatan penyelesaian BKPN lama dengan menerbitkan PSBDT terhadap BKPN yang sudah memenuhi syarat untuk di-PSBDT-kan serta melakukan tahap pengurusan piutang negara secara optimal hingga lunas.

4. Pejabat Fungsional Pelelang

- a. Untuk IKU PNBP Lelang, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah memperluas publikasi mengenai objek lelang berupa deksripsi dan foto yang menarik untuk mengajak masyarakat mengikuti lelang.
- b. Untuk IKU persentase produktifitas lelang, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah sebagai berikut:
 - Koordinasi kepada *stakeholder* tentang pemberian label/pengelompokan objek lelang berdasarkan tingkat laku dan permasalahan yang melekat pada objek lelang, sehingga calon pembeli lebih yakin dan tertarik.
 - Memberikan edukasi dibidang lelang dan hukum agar pemohon lelang tidak takut mengajukan lelang.
- c. Untuk IKU persentase implementasi *e-auction* dan *e-conventional auction*, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah sebagai berikut:
 - Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada *stakeholder* perihal keunggulan lelang dengan cara *e-auction* dan *e-conventional auction*.
 - Memberikan alternatif solusi kepada *stakeholder* berupa penyediaan fasilitas bantuan bagi masyarakat yang berminat yang berlokasi di wilayah terpencil (belum akrab dengan internet) untuk dapat mendaftar pada *website* Portal Lelang Indonesia (www.lelang.go.id) agar dapat menjadi peserta lelang.

5. Subbagian Umum

Untuk IKU kualitas pelaksanaan anggaran, strategi memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Semakin kecil deviasi antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan belanja barang dan modal, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- b. Semakin rendah rasio jumlah SPM salah, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- c. Semakin rendah rasio jumlah Retur SP2D, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.

- d. Semakin rendah rasio pagu minus, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- e. Semakin tinggi rasio konfirmasi capaian output, maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- f. Semakin tepat waktu pengelolaan Uang Persediaan (UP), maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.
- g. Semakin tepat waktu rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), maka semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada satker.

LAMPIRAN



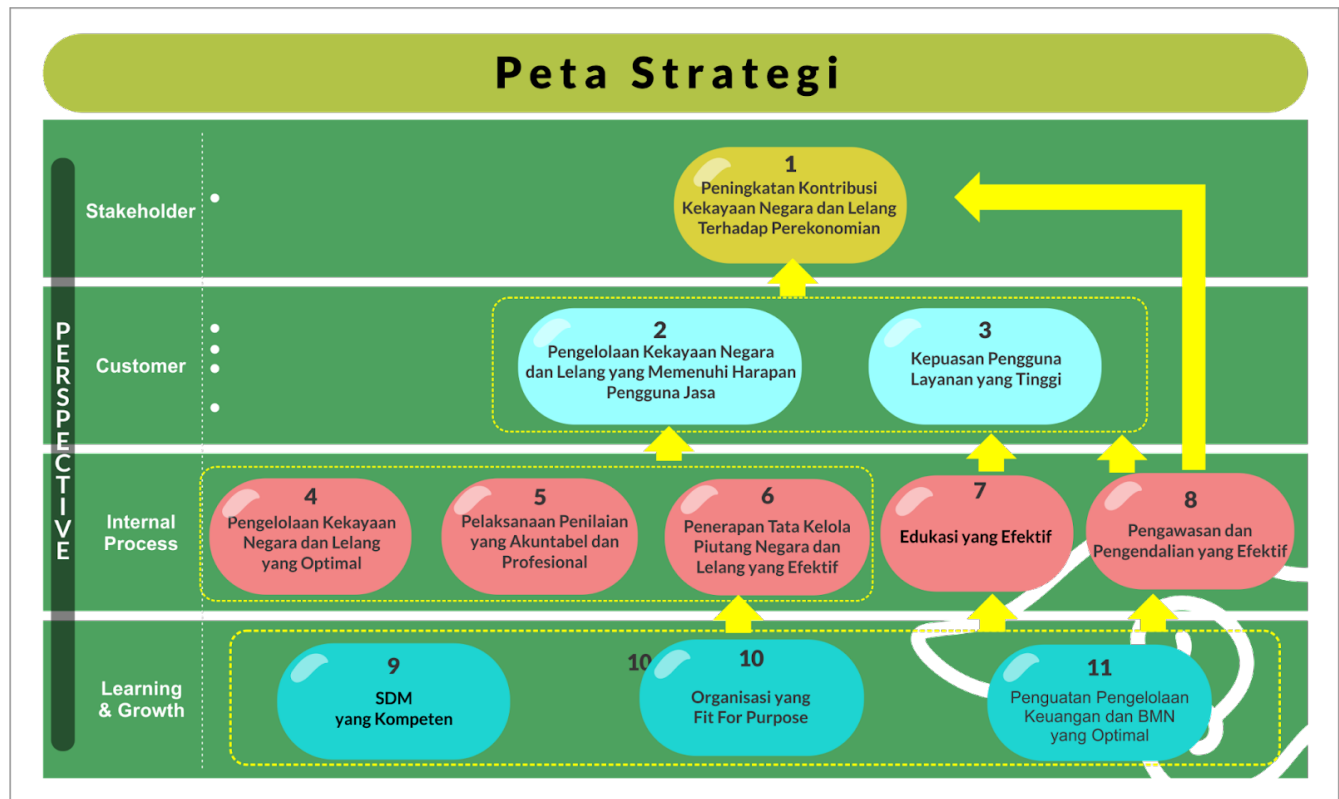
**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 8/KN.14/2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEMATANG SIANTAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEMATANG SIANTAR
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,77 (Skala 5)
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		11b-CP Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	4.978.000,-
2. Pengelolaan Aset	Rp	164.688.000,-
3. Legislasi dan Litigasi	Rp	14.054.000,-
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.528.124.000,-
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	2.800.000,-
6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	3.779.000,-

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Tedy Syandriadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Setiyo Pambudi



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEMATANG SIANTAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL						4,77	4,77
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	0	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi						90	90
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara		40%	40%		40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM						85	85
10b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja						80	80
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Setiyo Pambudi



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANG SIANTAR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Setiyo Pambudi

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Agus Setiyo Pambudi	NAMA	Tedy Syandriadi
NIP	197808052002121001	NIP	196508291991031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pematang Siantar	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,77
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
8	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
9	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset	100%
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%



13	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	90%
14	Pengawasan dan Pengendalian Yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
15	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
16	Organisasi yang fit-for-purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
17	Organisasi yang fit-for-purpose	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	80
18	Organisasi yang fit-for-purpose	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
20	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Setiyo Pambudi
NIP 197808052002121001

Jakarta, 1 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tedy Syandriadi
NIP 196508291991031001



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPKNL Pematang Siantar

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	135,13%	120%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	36%	45,15%	120%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	166,31%	120%
		2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	270,84%	120%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,77	4,9	102,73%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	90,66%	120%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	100%	115,91%	115,91%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	128,57%	120%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	122%	120%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	0,50%	120%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70%
		6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	0,00%	120%
7	Edukasi yang efektif	7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90	98,85	109,83%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%	92,50%	108,82%
9	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	120%

10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	85	95,44	112,28%
		10b-N	Nilai Review Pengelolaan Kinerja	80	99	120%
		10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99,21	110,23%
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	95,73%	100,24%
		11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	204%	120%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022	: Rp 1.726.635.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022	: Rp 1.560.148.358 (90,35%)

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120,00%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	135,13%	14%	50%	135,13%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	45,15%	14%	50%	125,43%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,70%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	166,31%	14%	50%	166,31%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	270,84%	14%	50%	270,84%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							102,73%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,77	4,90	21%	100%	102,73%	102,73%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							34,30%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							118,66%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	90,66%	14%	24%	139,47%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	115,91%	19%	33%	115,91%	115,91%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	128,57%	14%	24%	128,57%	120,00%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	122,00%	11%	19%	122,00%	120,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0,50%	14%	100%	197,37%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							109,83%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	90	98,85	14%	100%	109,83%	109,83%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							108,82%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	92,50%	14%	100%	108,82%	108,82%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,43%	
9	SDM yang Kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							114,17%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM	P/M	85	95,44	14%	33%	112,28%	112,28%	hijau
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	99,00	14%	33%	123,75%	120,00%	hijau
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	99,21	14%	33%	110,23%	110,23%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							110,12%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,73%	14%	50%	100,24%	100,24%	hijau
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	204,00%	14%	50%	204,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								115,43%	hijau

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR 119703

Waktu Olap: 2023-01-27 04:06:45.0 [B@6395c8f8]
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 27/01/23 10:32 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,726,635,000	1,560,148,358	(166,486,642)	90	2,765,493,000	2,637,676,670	127,816,330	96
C	PEMBIAYAAN				0				0



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL PEMATANGSIANTAR

DJKN

